

ABSTRAK

IMPLEMENTASI BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh

Fajar Bima Alfian

Perjanjian penetapan harga atau praktik kartel lahir dari konspirasi beberapa pelaku usaha yang menciptakan *entry barrier* melalui *tacit collusion*, dibutuhkan bukti tidak langsung untuk memperkuat proses pembuktian pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999). Implementasi bukti tidak langsung ditemukan dalam putusan No. 04/KPPU-I/2016 dan No. 15/KPPU-I/2019. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan bukti tidak langsung dan kekuatan hukum bukti tidak langsung dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian data diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bukti tidak langsung dalam perkara perjanjian penetapan harga berupa bukti komunikasi, bukti ekonomi dan *plus factors*. Bukti tidak langsung yang digunakan secara kumulatif sangat menentukan terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha, karena dapat membedakan antara perilaku paralel yang muncul akibat *tacit collusion* dengan yang terjadi akibat reaksi alamiah antar pesaing pada konsentrasi pasar tertentu. Bukti tidak langsung memiliki kekuatan hukum dan telah diakui keberadaannya sebagai bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999, pedoman Pasal 11, Pasal 5, dan Perkom No. 2 Tahun 2023 dan Mahkamah Agung mengakui dan membenarkan penggunaan bukti tidak langsung oleh Majelis Komisi dalam penentuan pelanggaran hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: *Bukti Tidak Langsung, Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian Penetapan Harga.*

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF INDIRECT EVIDENCE IN SETTLEMENT
OF COMPETITION LAW CASES****By****Fajar Bima Alfian**

Price-fixing agreements or cartel are born from the conspiracy of several business actors who create entry barriers through tacit collusion, requires indirect evidence to prove the occurrence or non-occurrence of violations of the Competition Law (Law Number 5 of 1999). The implementation of indirect evidence is found in case Number 04/KPPU-I/2016 and Number 15/KPPU-I/2019. The problem in this study is how the use of indirect evidence in the settlement of business competition law cases and the legal force of indirect evidence in determining violations of business competition law. The problem in this research is how to use indirect evidence in the settlement of competition law cases and the legal strength of indirect evidence in determining competition law violations. This type of research is normative legal research with descriptive research type.

The approach to the problem used is the statutory and case approaches. Data collection is done by literature study and document study. Furthermore, the data is processed through data checking, classification, and systematics and analyzed qualitatively.

The research results show that using indirect evidence in the price-fixing agreement case in the form of communication evidence, economic evidence and plus factors. Indirect evidence that is used cumulatively determines the occurrence of violations of competition law because it can distinguish between conscious parallels that arise as a result of tacit collusion and those that occur as a result of natural reactions between competitors at certain market concentrations. Indirect evidence has the force of law, and its existence has been recognized as part of the clue evidence since stipulated in Article 42 of Law Number 5 of 1999, guidelines for Article 11, Article 5, and Perkom Number 2 of 2023 and the Supreme Court strengthened and confirm the use of indirect evidence by the Commission Council in determining competition law violations.

Keywords: *Indirect Evidence, Competition Law, Price-Fixing.*